



Framing Pemberitaan TV Nasional terhadap Persepsi Masyarakat dalam Kasus Korupsi di Indonesia

Nabil Hayyan¹, Wan Muhammad Arraffi², Jamaluddin Syarif Hidayat³, Inda Bahriyuhani⁴, Pia Khoirotunnisa⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : nabilhayyan5@gmail.com¹, wanmuhammadarraffi@gmail.com², jamaluddinsyrf@gmail.com², indaaby@gmail.com⁴, pia.khoirotun@uinjkt.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received October 06, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

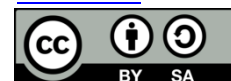
Keywords:

Framing analysis, Corruption cases, Public perception

ABSTRACT

This study analyzes the framing of national television news coverage regarding corruption cases in Indonesia and its impact on public perception. Corruption is a critical issue that remains a constant focus of media attention, and the way media frames such news has the potential to shape public opinion. This study employs framing analysis to identify how national television constructs the reality of corruption cases through word choice, the emphasis of particular aspects, and narrative formation. The data sources are news reports from several leading national television stations that covered major corruption cases within a specific period. The findings reveal variations in the framing used, ranging from moral, legal, to political-economic frames, depending on the television station and the focus of the coverage. These frames are then analyzed in relation to public perceptions of corruption levels, the effectiveness of law enforcement, and trust in public institutions, measured through surveys or in-depth interviews. The research findings are expected to provide a comprehensive picture of the role of media in shaping public perceptions of corruption issues, while also highlighting the implications of diverse media frames on public understanding and participation in anti-corruption efforts in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 06, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 26, 2025

Kata Kunci:

Analisis pemberitaan, Kasus-kasus korupsi, Persepsi publik

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bingkai pemberitaan televisi nasional dalam kasus korupsi di Indonesia dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Korupsi merupakan isu krusial yang terus-menerus menjadi sorotan media, dan cara media membingkai berita berpotensi membentuk opini publik. Studi ini menggunakan analisis framing untuk mengidentifikasi bagaimana televisi nasional mengkonstruksi realitas kasus korupsi melalui pemilihan kata, penonjolan aspek tertentu, dan penentuan narasi. Sumber data berasal dari pemberitaan beberapa stasiun televisi nasional terkemuka yang meliput kasus korupsi besar dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam bingkai pemberitaan yang digunakan, mulai dari bingkai moralitas, hukum, hingga ekonomi politik, tergantung pada stasiun televisi dan fokus liputan. Bingkai-bingkai ini kemudian dianalisis keterkaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi, efektivitas penegakan hukum, dan kepercayaan terhadap



institusi publik, yang diukur melalui survei atau wawancara mendalam. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran media dalam membentuk persepsi publik terkait isu korupsi, sekaligus menyoroti implikasi dari keberagaman bingkai pemberitaan terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nabil Hayyan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: nabilhayyan5@gmail.com

PENDAHULUAN

Televisi, sebagai salah satu bentuk media massa, memiliki keunggulan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas ke seluruh penjuru negeri. Keberadaannya membuat jarak geografis terasa tak lagi menjadi hambatan, bahkan memungkinkan masyarakat menyaksikan langsung perkembangan berita dari luar negeri. Perkembangan media dan teknologi informasi turut menjadi elemen penting dalam menunjang pencapaian tujuan politik. Karena itulah, media massa memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi opini masyarakat. Untuk tetap menarik perhatian khalayak, media dituntut menyajikan berita yang tidak hanya informatif tetapi juga memiliki daya tarik komersial, karena media juga beroperasi dalam logika bisnis. Dengan demikian, penyajian berita kerap disesuaikan dengan selera pasar. Hal ini menyebabkan munculnya variasi dalam cara media mengemas informasi, yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis masing-masing. Tingginya intensitas konsumsi tayangan televisi oleh masyarakat pun melahirkan berbagai dampak yang memengaruhi kehidupan sosial mereka (Hakim & Amina, 2021).

Pada era modern, media massa memiliki peranan penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam isu-isu strategis seperti kasus korupsi. Salah satu pendekatan teoretis yang relevan untuk memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat adalah teori framing. Teori ini berpendapat bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai (framing) berita sedemikian rupa sehingga membentuk cara audiens memahami suatu peristiwa.

Kasus dugaan korupsi di Pertamina, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia, menjadi contoh nyata bagaimana pemberitaan dapat membentuk narasi di tengah masyarakat. Melalui pilihan kata, fokus berita, serta penonjolan aspek tertentu dari kasus, media nasional berperan dalam membangun konstruksi sosial mengenai siapa yang dianggap bertanggung jawab, seberapa besar kerugian negara, hingga bagaimana solusi terhadap kasus tersebut dipersepsikan.

Framing dalam pemberitaan kasus korupsi Pertamina berpotensi memperkuat stereotip negatif terhadap BUMN, membangun persepsi pesimistis terhadap upaya pemberantasan korupsi, atau bahkan mengalihkan fokus publik dari aktor-aktor utama yang terlibat. Dengan demikian, analisis terhadap efek framing media dalam kasus ini menjadi penting untuk



memahami sejauh mana pemberitaan dapat mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan tindakan masyarakat terhadap institusi negara dan penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi media massa sebagai landasan analisis. Dalam konteks ini, model framing dimanfaatkan untuk memahami bagaimana media atau jurnalis memilih dan menyusun isu dalam pemberitaan berdasarkan sudut pandang dan perspektif tertentu. Analisis framing digunakan untuk mengungkap bagaimana media membentuk realitas melalui pilihan-pilihan tertentu yang mencerminkan ideologi mereka. Pendekatan ini menyoroti bagaimana media memilih, menonjolkan, dan menghubungkan fakta-fakta dalam pemberitaan sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih bermakna, menarik, mudah diingat, dan mampu mengarahkan pemahaman audiens sesuai sudut pandang media tersebut.

Konsep framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman juga menjelaskan proses ini, yakni bagaimana media secara selektif menyoroti bagian tertentu dari kenyataan untuk membentuk cara pandang publik terhadap suatu isu. Analisis menurut Robert N. Entman berfokus pada dua aspek utama: pemilihan isu dan penekanan terhadap elemen-elemen tertentu dari kenyataan, sehingga menciptakan konteks yang lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana framing pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh TV Nasional? Kedua, apa saja elemen framing yang dominan dalam pemberitaan kasus korupsi di TV Nasional?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk framing pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh TV Nasional serta mengetahui elemen framing yang dominan dalam pemberitaan kasus korupsi di TV Nasional (Hakim & Amina, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan menganalisis setiap kasus berdasarkan karakteristiknya yang unik. Dalam penelitian kualitatif, kualitas data menjadi hal yang sangat penting, oleh karena itu diperlukan data yang akurat dan komprehensif, baik berupa data primer maupun sekunder (Sahir, 2021). Keakuratan dan kelengkapan data tersebut berperan penting dalam menjaga integritas hasil penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta interaksi dengan narasumber secara diam-diam, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti dokumen media, laporan penelitian jangka panjang, dan arsip pemberitaan. Kombinasi dari kedua jenis data ini memungkinkan peneliti menyajikan gambaran objektif yang memperkuat analisis fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang dampak framing pemberitaan TV nasional terhadap persepsi masyarakat dalam kasus korupsi di Indonesia, sehingga proses pembentukan persepsi publik oleh media televisi dapat dikaji secara lebih mendalam.

Adapun subjek penelitian ini adalah Bapak Ahmad Fahrudin selaku dosen akademisi dari Universitas PTIQ Jakarta, serta TV nasional yang dalam hal ini difokuskan pada Metro TV. Sementara itu, objek penelitian adalah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama. Menurut definisi Esterberg, wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertukar



informasi dan ide melalui proses tanya jawab mengenai suatu topik tertentu, sehingga dapat membentuk makna dalam topik tersebut (Pahleviannur et al., 2023). Selain wawancara, teknik observasi juga digunakan agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan akurat. Creswell menjelaskan bahwa observasi merupakan proses pengumpulan data melalui penggunaan indera manusia dalam kondisi alamiah, yaitu dengan mengamati fenomena sosial secara langsung di dunia nyata dan mencatat kejadian-kejadian sebagaimana adanya (Fiantika et al., 2022).

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti mengacu pada pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir, yaitu sebagai upaya untuk mencari dan menyusun catatan hasil observasi, wawancara, dan data lainnya secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain (Rijali, 2018). Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai subjek atau fenomena yang dikaji, serta menyajikan hasil yang dapat dipahami dan digunakan oleh peneliti lain yang memiliki pengetahuan sejenis. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang menggambarkan, menganalisis, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing Pemberitaan Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Metro TV pada Program Acara Primetime News

Berdasarkan analisis terhadap tiga berita yang tayang dalam program Primetime News Metro TV dari 25 Februari 2025 hingga 14 Maret 2025, Metro TV secara konsisten membingkai kasus korupsi impor BBM Pertamina sebagai suatu masalah besar dalam tata kelola energi nasional. Framing yang ditonjolkan adalah penggambaran krisis tata kelola minyak mentah sebagai bentuk kegagalan sistem dan struktural, sekaligus ketidakmampuan pejabat di Pertamina dalam menjaga integritas perusahaan.

Pada aspek *define the problem*, Metro TV secara umum mendefinisikan kasus ini sebagai persoalan serius yang merugikan negara dengan jumlah kerugian mencapai Rp193,7 triliun. Secara khusus, kerugian negara disoroti oleh Metro TV melalui pengoplosan BBM dari RON 92 menjadi RON 90. Kasus ini dipandang bukan semata pelanggaran individu, tetapi menunjukkan krisis sistemik dalam manajemen Pertamina dan lemahnya fungsi pengawasan oleh negara.

Dalam pemberitaannya, Metro TV acapkali mengaitkan tokoh-tokoh seperti ST Burhanuddin (Jaksa Agung) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (mantan Komisaris Utama Pertamina). Berdasarkan konferensi pers Jaksa Agung, Metro TV seolah-olah mendukung ancaman hukuman mati bagi para tersangka yang disampaikan oleh ST Burhanuddin. Di akhir berita, Metro TV memberikan infografis klasifikasi jumlah kerugian yang dilakukan oleh para tersangka. Pemberitaan juga menyorot pemeriksaan Ahok oleh Kejagung sebagai saksi, dengan kecenderungan membela posisi Ahok sebagai bagian dari upaya penyelidikan, bukan sebagai pelaku utama.

Melihat beberapa contoh di atas, Metro TV sangat menggantungkan dominasi tokoh dalam pengangkatan masalah. Dengan kata lain, Metro TV pada program Primetime News tidak secara mendalam melakukan investigasi terhadap kasus korupsi yang menyeret sembilan



nama tersangka. Metro TV hanya menggembar-gemborkan suatu peristiwa yang dialami oleh orang besar—punya nama dan pengaruh kuat.

Kepala Program Studi Komunikasi Universitas PTIQ Jakarta, Ahmad Fahrudin mengatakan, roda gigi pergerakan media tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni idealisme, ekonomi, dan Bisnis. Untuk saat ini, lanjut Ahmad, media khususnya televisi dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa hanya dipahami sebagai pilar demokrasi, tetapi televisi juga sebagai institusi bisnis mempunyai modal kapital. Media sebagai institusi bisnis itu sangat menggiurkan bagi orang-orang sukses dan banyak pengusaha bergulat di bisnis media. Ahmad mengungkapkan, Metro TV dengan Surya Paloh sebagai pimpinan grupnya harus dilihat sebagai satu industri bisnis.

Kemudian, Ahmad mengungkapkan, beberapa media bertransformasi menjadi kekuatan politik. Acapkali para pemimpinnya menggunakan media demi kepentingan politik. Maka dari itu, pimpinan partai politik notabene juga punya media. Ahmad menjelaskan, berdasarkan data yang didapatkan, Surya Paloh itu mengambil sikap yang cenderung abu-abu, antara berkoalisi dengan Rezim Prabowo Subianto sebagai presiden atau ia mengambil sikap oposisi. Kecenderungan itu, ujar Ahmad, adalah bagian dari strategi Surya Paloh. Ia bisa memainkan situasi politik saat ini dan mediana, Metro TV, dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Berdasarkan data yang disajikan, Ahmad menilai, Metro TV cenderung kurang independen. Hal itu disandari pada narasumbernya yang cenderung berasal dari kalangan pemerintah atau unsur penguasa. Ahmad berpendapat, media seharusnya berimbang dalam pembuatan berita, seperti mengutip pendapat-pendapat yang kontra dari pemerintah, swasta, atau pakar komunikasi yang dianggap masih independen.

Elemen Framing yang Dominan dalam Pemberitaan Kasus Korupsi di Metro TV pada Program Acara Primetime News

Melalui pendekatan analisis framing Entman, dapat diidentifikasi, dalam tiga berita yang dianalisis, elemen define the problem paling dominan. Elemen define the problem tampak jelas di hampir seluruh berita. Metro TV tidak hanya menyajikan kasus ini sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai krisis tata kelola dan pengawasan energi nasional. Metro TV mempertegas skala kerugian yang terjadi, menonjolkan angka Rp193,7 triliun dan “kerugian negara” serta menunjukkan kompleksitas korupsi melalui praktik blending BBM yang menipu konsumen. Selain itu, Metro TV mengaitkan masalah dengan lemahnya sistem rekrutmen dan pengawasan terhadap pejabat BUMN.

Kesadaran akan krisis sistemik itu disandarkan pada kasus-kasus yang menyangkut nama-nama besar, seperti ST Burhanuddin (Jaksa Agung) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (mantan Komisaris Utama Pertamina), hingga respons dari Mantan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri BUMN Erick Thohir—dalam berita lain yang menyangkut pemberitaan BBM. Metro TV membingkai peristiwa sistemik melalui keterkaitan nama-nama besar terhadap kasus korupsi tersebut. Metro TV tidak meletakkan fokusnya pada pendalaman isu atau investigasi terhadap kasus tersebut. Masalah akan tampak besarnya jika dilakukan oleh orang-orang besar atau punya pengaruh yang kuat. Di sanalah ranah pemingkai yang kerap kali dilakukan oleh Metro TV pada program Primetime News. Thumbnail yang ditampilkan tak luput dari foto orang-orang besar tersebut sehingga muncul



kesan Metro TV sedang membingkai satu peristiwa dengan pusat permasalahan yang dialami oleh orang-orang besar itu.

Melihat dari elemen yang lain, make moral judgment tidak terlalu menonjol. Walakin, Metro TV juga menyisipkan penilaian moral terhadap para pelaku, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, dengan menyebut pembentukan grup WhatsApp oleh tersangka sebagai tindakan "menari-nari di atas penderitaan rakyat". Di sisi lain, Metro TV juga menyoroti bahwa tuntutan hukuman mati bagi tersangka dipandang sebagai bentuk keadilan atas kejahatan yang dilakukan saat masa pandemi Covid-19. Penilaian moral juga diarahkan pada kelembagaan negara, khususnya terhadap Kejaksaan Agung. Dalam pemberitaan Ahok, Metro TV mempertanyakan mengapa pemeriksaan Ahok dilakukan sebelum pemeriksaan tersangka utama. Pada akhirnya, menggiring narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa kasus korupsi bisa dituntaskan dengan penegakan hukum—suggest remedies.

Namun saja, moral judgment yang dikeluarkan oleh Metro TV tidak secara langsung mereka sampaikan melalui pihak internal. Mereka meminjam ludah narasumber lain untuk berargumentasi—jurnalisme ludah. Ketika analisis temuan data berlangsung, sangat sulit untuk melihat standing point Metro TV dalam program Primetime News ini. Ada dua kemungkinan yang dapat dilihat. Pertama, standing point pihak Metro TV bisa dilacak melalui narasi yang dibawakan oleh News Anchor ataupun gambar atau cuplikan video yang disematkan dalam pemberitaan tersebut. Kedua, memang pada dasarnya, Metro TV tidak punya standing point yang jelas dalam memberitakan kasus korupsi. Sebagian besar berita yang dianalisis, fokus utama Metro TV hanya pada nilai berita yang bisa menggiring ribuan mata orang untuk melihat berita yang mereka sajikan.

Secara umum, dominasi define the problem memperlihatkan bahwa framing Metro TV diarahkan untuk melihat aktor besar yang sebenarnya punya andil secara langsung atau tidak langsung dalam kasus mega korupsi Pertamina dan membangun kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya perubahan sistem dan pengawasan dalam memanajerial satu perusahaan milik rakyat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis framing pemberitaan kasus korupsi oleh Metro TV menunjukkan bahwa media ini tidak sepenuhnya netral dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pemiliknya, dalam hal ini Surya Paloh. Metro TV lebih menekankan pada elemen define the problem, yaitu dengan membingkai kasus korupsi impor BBM bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai krisis tata kelola dan pengawasan dalam sistem birokrasi nasional. Pemberitaan menyoroti angka kerugian besar, kelemahan sistem rekrutmen, serta ketidakefisienan pengawasan di tubuh BUMN, khususnya Pertamina. Penekanan pada sudut pandang pejabat dan absennya investigasi mendalam terhadap tokoh-tokoh kunci menunjukkan adanya strategi pemberitaan yang bersifat selektif dan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi pemilik media.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." Jurnal Alhadharah 17 (2018): 84.



- Ardian Mulyadi. Ada Apa dengan Pertamina? Analisis Hukum terhadap Kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga, 2025. Vol. 01 No. 01, Hal. 37–48.
- Aswara D., dkk. “Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi.” <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pertamina-kejagung-periksa-8-saksi--1216714>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2025.
- Bryant, Jennings., dan Mirion, Dorina. “Theory and Research in Mass Communication 1952–2000.” *Journal of Communication*, 2004.
- Butsi, F. Ichwan. “Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, Vol. 1 No. 3 (2019): 52–57.
- Entman, Robert. “Framing US Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents.” *Journal of Communication* 41(4), 1991.
- Entman, Robert. “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” *Journal of Communication* 43(4), 1993: 51–58.
- Entman, Robert. “Media and Democracy Without Party Competition.” Dalam J. S. Curran & M. Gurevitch (Eds.), *Mass Communication and Society*, 4th ed., 2005: 251–270.
- Entman, Robert. “Punctuating the Homogeneity of Institutionalized News: Abusing Prisoners at Abu Ghraib Versus Killing Civilians at Fallujah.” *Political Communication*, Vol. 23, 2006: 215–224.
- Entman, Robert. “Freezing Out the Public: Elite and Media Framing of the U.S. Antinuclear Movement.” *Political Communication* 10, 1993b: 155–173.
- Entman, R., & Rojecki, A. “Freezing Out the Public: Elite and Media Framing of the U.S. Antinuclear Movement.” *Political Communication* 10(2), 1993c: 151–167.
- Feny Rita Fiantika, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. M.Hum Yuliatr Novita. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, n.d.
- Gamson, W.A., & Modigliani, A. “Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach.” *American Journal of Sociology* (1989): 321–323.
- Gamson, W.A., dan A. Modigliani. “The Changing Culture of Affirmative Action.” *Research in Political Sociology*, 1987: 137–177.
- Hakim, L., dan R. Amina. “Analisis Framing Acara Rosi di Kompas TV Episode 'Ganja: Mitos dan Fakta' Periode 6 Februari 2020.” *DIGICOM: Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2021.
- International Communication Association. 2005: 1.
- International Communication Association. 2006: 3.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, S.Pd., et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. M.Pd. Dr. Fatma Sukmawati. PRADINA PUSTAKA, 2022.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Ed. M.Si Dr. Ir. Try Koryati. Medan: KBM Indonesia, 2022.



Sumartias, S., & M. Hafizni. “Convergence Trends in the Television Media Industry — A Case Study on the Implementation of Media Convergence in Metro TV, Jakarta.” 2017.

William Gamson dan Andre Mondigliani. “The Changing Culture of Affirmative Action.” Research in Political Sociology, hlm. 137–177.